

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat

ALISMAN

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar,  
Jl. Alue Peunyang, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia  
[alisman@utu.ac.id](mailto:alisman@utu.ac.id)

Ummu HANIF

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar,  
Jl. Alue Peunyang, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia  
[ummuhanif1101@gmail.com](mailto:ummuhanif1101@gmail.com)

Dedi SUFRIADI \*

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas KIP, Universitas Serambi Mekkah  
Jl. Unmuha, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia  
[dedisufriadi@serambimekkah.ac.id](mailto:dedisufriadi@serambimekkah.ac.id)

### Article's history:

Received 11 October 2022; Received in revised form 21 November 2022; Accepted 25 November, 2022; Published 30 November 2022. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

### Suggested citation:

Alisman, Hanif, U., & Sufriadi, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 8(2), 116–124. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i2.830>.

### ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengeluaran pemerintah, investasi publik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2005-2018. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan melakukan pengujian asumsi klasik, yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokolinieritas, koefisien kolinieritas (R), koefisien determinasi (R Adjusted), uji F, dan uji t. perhitungannya menggunakan Software Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh variabel pengeluaran pemerintah (X1), investasi publik (X2) dan PDRB (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Kabupaten Aceh Barat. Beberapa saran yang diharapkan yaitu agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk lebih meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga perlu mengukur Peningkatan PAD dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga perlu meningkatkan investasi guna mengundang para investor untuk berinvestasi sehingga dengan banyaknya para investor maka diharapkan akan dapat meningkatkan dan berimbas kepada masyarakat Aceh Barat dan masyarakat pun bisa hidup produktif.

**Kata Kunci:** Pengeluaran Pemerintah; Investasi Publik; Produk Domestik Regional Bruto; Pendapatan Asli Daerah.

### ABSTRACT:

This study aims to analyze government spending, public investment, Gross Regional Domestic Product (GRDP) on Regional Original Income (PAD) in West Aceh District in the period 2005-2018. The analysis model used is multiple linear regression by testing the classical assumptions, namely; normality test, multicorrelation test, heterocidity test, autocorrelation test, correlation coefficient (R), coefficient of determination (R Adjusted), F test, and t test. the calculation uses Software Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Based on the results of the study, it was obtained that the variables of government spending (X1), public investment (X2) and GRDP (X3) had a positive and significant effect on Regional Original Income (Y) of West Aceh Regency. Some of the suggestions that are expected are to become a concern for the West Aceh District Government to further increase the allocation of development expenditures in order to be able to stimulate regional economic growth. The West Aceh District Government also needs to measure the increase in PAD with its role in regulating the community's economy so that it can develop more, which in turn can improve the welfare of the people in West Aceh. In addition, the West Aceh District Government also needs to increase investment to invite investors to invest so that with many investors it is hoped that it will increase and impact the people of West Aceh and the community can live productive lives.

**Keywords:** Government Spending; Public Investment; Gross Regional Domestic Product; Locally-Generated Revenue.

**JEL Classification:** G18; R53; D24.

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan ukuran kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi aliran pendapatan tambahan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin besar kemandirian daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan. Kontribusi yang signifikan dari belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya menjadi peluang yang optimal untuk merevitalisasi perekonomian daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pajak, bea masuk, hasil usaha milik daerah, dan hasil pengelolaan aset daerah seperti keuntungan, dividen, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lainnya. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bisa dikatakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang tertuju pada hasil perusahaan milik daerah

Kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi netto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Sufriadi, 2015). Pengeluaran pemerintah daerah juga merupakan alat untuk intervensi pemerintah dalam perekonomian dan dianggap sebagai ukuran paling efektif seberapa baik pertumbuhan ekonomi dan PDB dicapai. Selain itu juga ditentukan oleh tingkat pengeluaran pemerintah, proses pembangunan negara juga ditentukan oleh investasi, bagaimana membuka pintu bagi investor untuk berinvestasi, dampak investasi mempengaruhi hal lain, sehingga peningkatan produksi mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Investasi adalah sekumpulan dana atau sumber dana lain yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk pertumbuhan suatu aset, dengan harapan menghasilkan keuntungan tambahan atau keuntungan di masa mendatang dari dana tersebut. Diharapkan untuk mendistribusikan pendapatan investasi dalam bentuk bunga, royalti, dan dividen. Seluruh sektor ekonomi sangat dibutuhkan untuk menurunkan tingkat pendapatan masyarakat karena melibatkan pemerataan hasil investasi dan pertumbuhan.

Sehingga setiap daerah tentu akan selalu berusaha untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya baik dengan mencari sumber pendapatan baru maupun dengan mengoptimalkan sumber penerimaan yang sudah ada. Sementara itu, dapat kita lihat bahwasanya untuk memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah masih kurang optimal yaitu ditunjukkan dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah yang belum sesuai dengan harapan khususnya di Kabupaten Aceh Barat.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah beberapa sumber PAD yang terdiri dari:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah. (Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (2004), PAD dibagi menjadi beberapa bagian yang dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap PAD. Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan dan menurut sudaryo menyatakan bahwa pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

- 2) **Retribusi daerah**  
Penerimaan pemerintah daerah selain pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukan kepada pemerintah daerah adalah berasal dari retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi adalah pemungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung dan nyata.
- 3) **Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.**  
Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha milik Daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah antara lain bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**  
Jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsur atau cicil, jasa giro. Pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Pemberian wewenang dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

### **Investasi**

Secara teoritis investasi diartikan sebagai kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumberdaya saat ini dengan harapan mendapatkan mamfaat dikemudian hari, untuk memudahkan pengertian dan perhitungan yang diperlukan investasi diterjemah dalam beberapa pengertian di antaranya. (Todaro Michael P ; Smith Stephen C., 2011) menyatakan bahwa sumberdaya yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi dimasa yang akan datang, disebut sebagai investasi.

Dilihat dari sisi manfaat yang ditimbulkan investasi dapat dikelompokan sebagai berikut :

- 1) **Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik)**  
Investasi yang bermanfaat untuk umum adalah kegiatan investasi yang bermamfaat untuk masyarakat luas, misal seperti bidang pendidikan dan sumberdaya manusia, investasi bidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya)
- 2) **Investasi yang manfaat untuk kelompok tertentu**  
Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu adalah investasi yang hanya bermanfaat untuk kelompok masyarakat tertentu, investasi ini misalnya dibidang keagamaan, pembangunan sarana ibadah.
- 3) **Investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau keluarga.**  
Investasi yang bermanfaat untuk pribadi adalah investasi yang mendatangkan manfaat pribadi atau keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah:

- 1) **Kondisi Internal Perusahaan**  
Kondisi internal adalah faktor-faktor yang ada dibawah kontrol perusahaan, misalnya tingkat efesiensi, kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan.
- 2) **Kondisi Eksternal Perusahaan**  
Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembalian keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tingkat dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional.

### **Pengeluaran pemerintah**

Pengeluaran pemerintah melalui APBN tercermin dalam realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan

mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (current expenditure), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain (Buana et al., 2019). Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi dan menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pegawai diharapkan akan menyebabkan kenaikan produksi yang diukur dengan PDB. Kenaikan belanja barang dan jasa juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi nasional dan provinsi. Peningkatan belanja barang dan jasa juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal juga dapat disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

### **Hubungan Pengeluaran pemerintah, Investasi publik, PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hubungan pengeluaran pemerintah dengan PAD sangat jelas apabila pengeluaran pemerintah digunakan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan publik hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Meningkatnya kegiatan ekonomi membuat pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi sehingga memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan hubungan investasi publik terhadap PAD yaitu berupa meningkatnya investasi sektor publik akan dapat meningkatkan stok barang modal pada suatu daerah yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerahnya. (Hariandja, n.d.) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sangat membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Peningkatan investasi berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Dengan demikian, upaya harus dilakukan untuk mendorong investasi, termasuk kepastian hukum, stabilitas politik, birokratisasi, dan kepastian dan keberlanjutan kebijakan fiskal. Tetapi, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat investasi asing di Indonesia menurun adalah pajak dan insentif non-fiskal lainnya yang tidak mendukung investasi. Untuk hubungan PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya, sehingga dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan dapat mensejahterakan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian ini yakni meliputi pengeluaran pemerintah, investasi publik, produk domestik regional bruto, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. dalam kurun waktu 2005-2018.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder dalam bentuk time series. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), Kabupaten Aceh Barat.

### Model Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dilihat untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang di transformasikan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

persamaan tersebut ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural sebagai berikut :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \mu$$

Keterangan :

- Y = PAD (variabel terikat) yang diukur dalam miliar  
 $\beta_0$  = Intercept/Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi  
 $X_1$  = Pengeluaran pemerintah (variabel bebas) yang diukur dalam rupiah  
 $X_2$  = Investasi sektor publik (variabel bebas) yang diukur dalam rupiah  
 $X_3$  = Produk Domestik Regional Bruto (variabel bebas) yang diukur dalam rupiah  
 $\mu$  = Error Term

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat

Mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari porposisi pengeluaran tidak langsung dan belanja langsung juga dapat dilihat dari komposisi perkembangan demikian efisiensi tidak dapat dilihat melalui satu tertentu melainkan beberapa indikator secara bersama-sama. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat, Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan PAD, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik dan PDRB Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005 s/d 2018

No	Tahun	PAD (Rupiah)	Pengeluaran pemerintah (Rupiah)	Investasi sektor publik (Rupiah)	PDRB (Rupiah)
1	2005	6.128.283.21	194.982.015	13.229.906.780	878.891,73
2	2006	17.141.428.849	303.421.501	19.553.746.897	966.250,11
3	2007	21.710.256.581	453.714.542	25.000.850.000	1.081.722,63
4	2008	40.423.494.271	436.720.227	367.120.000.000,00	1.140.817,36
5	2009	27.874.493.673	477.828.923	367.120.000.000,00	1.208.158,00
6	2010	24.272.256.835	443.919.805	227.936.000.000,00	4.462.045,20
7	2011	21.042.866.954	520.526.207	446.660.000.000,00	4.569.067,05
8	2012	24.727.256.869	563.696.948	225.131.000.000,00	4.594.543,90
9	2013	46.928.106.802	684.806.015	294.766.000.000,00	4.773.668,84
10	2014	112.034.104.121	906.667.816	367.556.000.000,00	4.933.842,70
11	2015	130.428.452.038	1.152.818.781	417.116.000.000,00	5.160.040,90

12	2016	140.614.479.580	1.329.717.087	423.876.000.000,00	5.310.703,10
13	2017	161.743.458.643	1.487.974.087	423.876.000.000,00	6.009.220,80
14	2018	330.024.224.263	1.487.974.087	549.941.039.000,00	6.623.946,31

Berdasarkan Tabel 1. di atas, jumlah pengeluaran pemerintah setiap tahunnya meningkat Pada tahun 2005 pengeluaran pemerintah sebesar Rp 194.982.015 namun pada tahun 2007 pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh rehabilitas kota Meulaboh pasca bencana tsunami dan berbagai pengeluaran lainnya seperti pengeluaran pegawai dan pembelian asset daerah kemudian Pada tahun 2008 jumlah pengeluaran pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp 436.720.227 dan meningkat pada tahun 2009 sebesar Rp 477.828.923 terus mengalami pertumbuhan yang baik hingga tahun 2018 sebesar Rp 1.487.974.087 peningkatan ini sering terjadi setiap tahunnya dengan berpedoman pada pendapatan daerah atau APBD, tingginya tingkat pertumbuhan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Namun pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp 477.828.923 di sebabkan akibat terjadinya penurunan pendapatan daerah atau APBD di Kabupaten Aceh Barat.

### **Perkembangan Investasi Sektor Publik Kabupaten Aceh Barat.**

Investasi sektor publik dilakukan untuk memperoleh manfaat, baik berupa manfaat keuangan, tetapi dapat juga bersifat langsung yaitu apabila keputusan investasinya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga nantinya akan meningkatkan kapasitas anggaran pemda. Pada tabel 1 juga dapat dilihat perkembangan investasi sektor publik di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu mengalami peningkatan. Di mana terjadi fluktuasi pada tahun 2005 sebesar 13.229.906.780, tahun 2006 sebesar 19.553.746.897 pada tahun 2007 sebesar 25.000.850.000, pada tahun 2008 sebesar 367.120.000.000,00 mengalami peningkatan drastis karena nilai tukar yang stabil sehingga menarik para investor untuk berinvestasi, tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 22.793.600.000.000 hal ini karena inflais yang rendah sehingga dapat mempengaruhi para investor, tahun 2011 sebesar 44.666.000.000.000 mengalami peningkatan hal ini karena nilai tukar dan inflasi yang stabil, namun pada tahun 2012–2017 mengalami peningkatan walau tidak seperti tahun 2011, tahun 2012 sebesar 225.131.000.000,00, investasi sektor publik mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 423.876.000.000,000 hal ini karena beberapa faktor yaitu tersediannya infrastruktur yang baik bagi masyarakat, nilai tukar yang stabil dapat menarik para investor untuk berinvestasi, inflasi yang rendah dapat mempengaruhi para investor untuk menginvestasikan modalnya, kebijakan pemerintah yang menjadikan iklim investasi yang kondusif dapat menarik para investasi, dan kestabilan politik dan ekonomi makro.

### **Perkembangan PDRB Di Kabupaten Aceh Barat Tahun**

PDRB mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun, PDRB didapat dengan cara mengalikan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dngan harganya. PDRB merupakan salah satu bagian yang dapat mengatasi masalah perekonomian, dengan berkembangnya satu sub sektor PDRB maka pendapatan masyarakat akan mningkat dengan sendirinya sehingga pendapatan hasil daerah meningkat. Berdasarkan tabel 1, tingkat PDRB Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2005-2017 setiap tahunnya mengalami peningkatan yang baik pada tahun 2005 PDRB sebesar 878.891,73 rupiah, pada tahun 2006 sebesar 966.250,11 rupiah, pada tahun 2007 sebesar 1.081.722,63 rupiah, pada tahun 2008 sebesar 1.140.817,36 rupiah pada tahun 2011 sebesar 4.569.067,05 rupiah pertumbuhan PDRB terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebesar 6.623.946,31 rupiah. Hal ini karena bagusnya kebijakan pemerintah dalam mengelola kebutuhan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan PDRB yaitu: pendapatan asli daerah, tabungan dan belanja daerah. Semakin banyak porsi PDRB yang ditabung akan menambah capital stock sehingga akan meningkatkan perekonomian PDRB Aceh Barat, jika tabungan tinggi, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi.

### **Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah dan zakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki di Kabupaten Aceh Barat.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2005 sebesar 6.128.283.21 pada tahun 2008 sebesar 40.423.494.271 miliar, mengalami peningkatan karena pada tahun 2009 sebesar 27.874.493.673 miliar, hingga tahun 2010 sebesar 24.272.256.835 miliar. Pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan realisasi, dikarenakan di tahun ini kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk membayar hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan banyaknya masyarakat yang kurang membayar zakat sehingga menyebabkan Pendapatan Asli Daerah semakin menurun. Pada tahun 2012 - 2013 kembali mengalami kenaikan dikarenakan pungutan zakat dan pajak yang sangat optimal. Pada tahun 2012-2013 kembali meningkat disebabkan pajak daerah, retribusi daerah dan zakat yang sangat optimal. Tahun 2013-2018 mengalami peningkatan yang sangat besar disebabkan dari zakat, retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Adanya kesadaran dari badan atau orang pribadi yang membayar dan pemerintah sangat tegas, dalam melakukan pungutan untuk dapat dijadikan sebagai sumber utama pendapatan asli daerah.

### Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandaized Coefficient		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error			
(Contant)	-3,753	14,224		-0,264	0,000
Pengeluaran pmerinth	4,382	1,269	0,003	3,454	0,006
Invstsi pblik	0,984	0,000	1,000	2010,772	0,000
PDRB	-3,517	0,655	-0,005	-5,373	0,000

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS (diolah Mei 2020).

Berdasarkan Hasil penelitian ini maka diperoleh persamaan regresi linier berganda akhir sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln pengeluaran pemerintah} + \beta_2 \text{Ln investasi publik} + \beta_3 \text{PDRB} + e$$

$$Y = -3,753 + 4,382 \text{ pengeluaran pemerintah} + 0,984 \text{ investasi publik} + -3,517 \text{ PDRB} + e$$

1) Konstanta

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar -3,753 nilai ini dijelaskan bahwa apabila variabel pengeluaran pemerintah, investasi sektor publik, PDRB sama dengan nol maka variabel PAD adalah sebesar -3,753.

2) Koefisien regresi pengeluaran pemerintah

Dapat dilihat bahwa nilai pengeluaran pemerintah sebesar 4,382 di mana hal ini menjelaskan bahwa apabila variabel pengeluaran pemerintah naik 1 persen maka akan meningkatkan variabel PAD sebesar 4,42582 persen.

3) Koefisien regresi investasi sektor publik

Dapat dilihat nilai investasi publik sebesar 0,984 di mana hal ini menjelaskan bahwa apabila variabel investasi sektor publik naik 1 persen maka akan meningkatkan variabel PAD sebesar 0,99384 persen.

4) Koefisien regresi PDRB

Dapat dilihat nilai PDRB sebesar -3,517 di mana hal ini menjelaskan bahwa apabila variabel produk domestik regional bruto naik 1 persen maka akan meningkatkan variabel PAD sebesar -3,55217 persen.

### **Hubungan Investasi Sektor Publik Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, investasi sektor publik secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan hasil signifikan pengujian 0,000 lebih kecil dari derajat signifikan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ), artinya menunjukkan bahwa hipotesis pertama  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa investasi sektor publik berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat, hal ini karena meningkatnya investasi baik investasi asing atau pun investasi dalam negeri namun nilai yang dijadikan penyertaan modal sebagai investasi bisa memberikan kontribusi besar terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat sehingga bisa membiayai pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hariandja dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sangat membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Peningkatan investasi berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Dengan demikian, upaya harus dilakukan untuk mendorong investasi, termasuk kepastian hukum, stabilitas politik, birokratisasi, dan kepastian dan keberlanjutan kebijakan fiskal. Tetapi, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat investasi asing di Indonesia menurun adalah pajak dan insentif non-fiskal lainnya yang tidak mendukung investasi.

### **Hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, PDRB secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan hasil signifikan pengujian 0,000 lebih kecil dari 0,05 derajat signifikan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ), artinya menunjukkan bahwa hipotesis pertama  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat, hal ini karena di mana semakin meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat dan kepatuhan masyarakat Aceh Barat dalam membayar pungutan pajak dan retribusi daerah serta bagaimana kebijakan pemerintah Aceh Barat dalam penetapan kebijakan pembayaran pajak sehingga dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini sesuai dengan rekomendasi (Alisman; & Sufriadi, 2020) dalam penelitiannya di mana mengarahkan pemerintah kabupaten dapat melakukan upaya-upaya pertumbuhan ekonomi dengan menggali sektor-sektor ekonomi produktif dan potensial yang dapat memberi pengaruh terhadap PAD daerahnya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara menciptakan dan mengelola potensi sumber-sumber ekonomi yang efisien.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variabel pengeluaran pemerintah, investasi publik dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat
- 2) Pengeluaran pemerintah digunakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah
- 3) Meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat melalui kepatuhan masyarakat Aceh Barat dalam membayar pungutan pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai program-program pembangunan
- 4) Meningkatnya investasi publik memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat sehingga mampu membiayai pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

## Saran

- 1) Pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik lebih bersifat sebagai akumulasi stok kapital. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk lebih meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi daerahnya
- 2) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu mengukur Peningkatan PAD dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat.
- 3) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar dapat meningkatkan investasi guna mengundang para investor untuk berinvestasi sehingga dengan banyaknya para investor maka diharapkan akan dapat meningkatkan dan berimbas kepada masyarakat Aceh Barat dan masyarakat pun bisa hidup produktif.

## REFERENSI

- Alisman, & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.133>.
- Buana, A. L., Juni, H., Saragih, R., Aritonang, S., & Pertahanan, U. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa tahun 2011-2015. *Ekonomi Pertahanan*, 4(2), 1–20.
- Hariandja, F. (n.d.). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ( PDRD ) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi*. 154–183.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 13 (2006).
- Sufriadi, D. A. H. (2015). Analisis Transformasi Struktural Perekonomian Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 14–22.
- Todaro Michael P ; Smith Stephen C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (2004).